

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pada tanggal 3 September 2013, Presiden Armenia Serzh Sargsyan telah mengungkapkan bahwa pemerintah Armenia siap untuk bergabung dengan Eurasian Customs Union (ECU) yang diprakarsai oleh Rusia. Kesepakatan Armenia ini membuat Armenia berada bersama dengan Rusia, Belarusia, serta Kazakhstan yang sebelumnya dikenal sebagai pelopor dari ECU tersebut. Hal ini sangatlah bertolak belakang jika dilihat dari berbagai kebijakan yang diumumkan dan dilakukan oleh Armenia sebelumnya. Sebelumnya, pihak Armenia lewat perdana menteriya menegaskan dengan lantang bahwa Armenia tidak memiliki inisiatif ataupun keinginan untuk bergabung dengan ECU tersebut. Selain itu, terjadinya penandatanganan tersebut akan berdampak pada hilangnya kesempatan Armenia untuk bergabung dengan Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA) dikarenakan ketidakcocokan sistem perekonomian dari ECU serta DCFTA.

Negosiasi antara Armenia dengan DCFTA dimulai pada Juli 2010.¹ DCFTA merupakan perjanjian Asosiasi yang dibuat oleh Uni Eropa. untuk melanjutkan kerjasama dengan tiga negara Eropa Timur yakni Armenia, Georgia, dan Moldova. Tujuan dibentuknya DCFTA bagi hubungan Uni Eropa dan Armenia adalah untuk mengganti sistem kerjasama kedua pihak tersebut yang

¹ "EU and Armenia Agree Trade Deal," *European Commission*, 24 Juli 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-740_en.htm (diakses pada 2 Mei 2014)

sebelumnya terjalin lewat Partnership and Cooperation Agreement (PCA). DCFTA dianggap “will strengthen Armenia's economic integration with the EU by providing better market access for European and Armenian goods and services to each other's markets.”² Menurut pihak Uni Eropa, dengan adanya DCFTA tersebut Armenia dapat memiliki akses pasar ke Uni Eropa dengan pengurangan tarif ekspor dan impor sehingga dianggap dapat memberikan keuntungan seperti kenaikan laba perekonomian hingga 146 juta euro per tahunnya dan dapat meningkatkan 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari Armenia. Keuntungan ini didapat karena Uni Eropa merupakan *trading partner* utama di Armenia dengan presentase total 32% dari perdagangan yang dilakukan dengan Armenia.³ Hingga tanggal 24 Juli 2013 atau babak negosiasi akhir antara Armenia dan Uni Eropa terkait DCFTA, Armenia menyatakan kesetujuannya untuk bergabung dengan DCFTA.⁴

Perlu diketahui bahwasanya hubungan Armenia dan Uni Eropa telah terjalin pada tahun 1999 dengan PCA. Lewat PCA tersebut, Uni Eropa berupaya mendukung dan membantu jalannya demokrasi di Armenia. Pada tahun 2004, Uni Eropa membuat European Neighbourhood Policy (ENP) yang kemudian juga melibatkan Armenia. Dalam ENP, terdapat program-program *action plan* yang ditujukan oleh Uni Eropa kepada Armenia pada tahun 2006 guna melakukan penataan kembali di bidang politik, ekonomi, dan institusi. Selain itu juga dibentuk program European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) yang berupaya membangun demokrasi dan pengurangan kemiskinan di Armenia

² “EU and Armenia Agree,” *European Commission*

³ “EU in Armenia”, *EU Centre*, 2013, <http://eucentre.am/eu-in-armenia/#trade> (diakses pada 25 September 2013)

⁴ “EU and Armenia Agree,” *European Commission*

lewat Country Strategy Paper (CSP) dengan periode 2007 hingga 2013. Dalam periode CSP tersebut, Armenia akan mendapatkan bantuan dana hingga total berjumlah 98,4 juta euro.⁵ Karena Armenia dianggap oleh Uni Eropa berhasil mengembangkan demokrasi dan mengurangi kemiskinan, Armenia juga mendapatkan dana secara bilateral dari Uni Eropa sebesar 157 juta euro pada tahun 2011-2013.⁶ Sedangkan pada tahun 2009, Uni Eropa kembali membentuk Eastern Partnership (EaP) dengan tujuan untuk memperkuat praktek hukum internasional, demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara Eropa Timur. Armenia sejak tahun 2009 juga telah melakukan pembicaraan dengan pihak Uni Eropa untuk bernegosiasi dalam konteks pembentukan DCTA yang nantinya direncanakan akan ditandatangani pada akhir tahun 2013 di Vilnius, Lithuania. Pada tanggal 24 Juli 2013, pihak pemerintah Armenia lewat Menteri Luar Negeri Edward Nalbandian telah menyepakati tahap negosiasi final dengan pihak Uni Eropa mengenai pembahasan DCFTA sebagai salah satu program dari Eastern Partnership Uni Eropa.⁷

Terkait dengan ECU, tanggal 4 April 2012 pihak pemerintah Armenia mengumumkan penolakannya untuk bergabung dengan serikat Eurasia tersebut, dan hanya membuka peluang untuk bekerjasama tanpa adanya rencana untuk menjadi anggota dari *Union* tersebut, “In an interview with *Kommersant*, Armenian Prime Minister Tigran Sarkisyan says that his country has no plans to

⁵ “European Neighbourhood and Partnership Instrument,” *European External Action Country Strategy Paper 2007-2013*, 8 Oktober 2007, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_armenia_en.pdf (diakses pada 2 Mei 2014)

⁶ “European Union External Actions : Armenia,” *Europa*, <http://eeas.europa.eu/armenia/> (diakses pada 25 September 2013)

⁷ “EU-Armenia Agree,” *European Commission*

join the Customs Union of Rusia, Belarus and Kazakhstan.”⁸ Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Armenia lewat Perdana Menteri Tigran Sargsyan sebagai perwakilan menyatakan bahwa Armenia tak memiliki rencana untuk bergabung dengan Customs Union yang diprakarsai oleh Rusia, Belarusia, dan Kazakstan tersebut karena Armenia tidak berbatasan langsung dengan negara-negara ECU.⁹ Selain itu, Tigran Sargsyan juga menganggap bahwa keanggotaan di ECU bukanlah hal yang relevan bagi Armenia karena Armenia tak memiliki *shared borders* dengan ketiga negara ECU lainnya, perbedaan alam yang membuat Armenia tidak memiliki sumber daya alam layaknya ketiga negara anggota ECU tersebut juga menjadi alasan, serta sistem liberal yang dianut oleh Armenia juga tidak kompatibel dengan negara-negara ECU yang semuanya lebih mengarah pada sosialis.¹⁰ Alasan tidak memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara ECU dianggap Tigran Sargsyan nantinya tetap akan memberikan beban terhadap produk impor ataupun ekspor yang masuk dan keluar Armenia.

“There are no examples in international practice when a country becomes a member of a Customs Union without having common borders [with its members]. It would be senseless. The essence of the Customs Union is that the exchange of goods is carried out without customs inspection. This is impossible in our case, as we have to pass through the territory of the neighboring country and we will only face problems connected

⁸“In the Interview with Armenian Prime Minister Gives The Reason For His Country’s Decision” *Common Space*, Agustus 2012, http://commonsplace.eu/print.php?lang=eng&news_id (diakses pada tanggal 25 September 2013)

⁹ Tigran Sargsyan, 4 April 2012, dalam Mikayel Zolyan, “Is Armenia Turning East,” *The Foreign Policy Centre*, September 2013, dalam <http://fpc.org.uk/articles/635> (diakses pada 24 September 2014)

¹⁰ Anahit Shirinyan & Stefan Ralchev, “U-Turns and Ways Forward: Armenia, the EU, and Russia Beyond Vilnius,” *Institute for Regional and International Studies*, 2013, dalam <http://iris-bg.org/files/iris-shirinyan&ralchev-Armenia-EU-Russia-Beyond-Vilnius-nov13.pdf> (didapat pada 20 November 2013) hal. 3

with the increase of customs duties and taxes. In terms of economy, it is inexpedient.”¹¹

Presiden Serzh Sargsyan juga memberikan alasan yang sama ketika dirinya bertemu dengan Vladimir Putin guna membahas kelanjutan harga minyak dari Rusia serta kelanjutan dari keanggotaan Armenia di ECU pada 8 Agustus 2012.

Gambar 1.1 Peta Regional Kaukasus



Sumber: Salome Asatiani, “Is South Caucasus Region An Artificial Construct,” *Payvand Iran News*, 30 Mei 2007, dalam <http://www.payvand.com/news/06/nov/Caucasus-Map.jpg> (diakses pada 20 September 2014)

Pada tanggal 3 September 2013, dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Serzh Sargsyan selaku presiden Armenia menyatakan bahwa Armenia akan bergabung dengan ECU. Dalam pertemuan yang membahas terkait keanggotaan ECU dan kelanjutan hubungan bilateral

¹¹ Tigran Sargsyan, 4 April 2012, dalam “PM Sargsyan: Armenia Will Seek Cooperation with Ex-Soviet States Partners without Joining Customs Union,” *ArmeniaNow*, 5 April 2012, dalam http://armenianow.com/news/37094/armenia_customs_union_cis_eurasec (diakses pada 25 September 2013)

keduanya tersebut, Presiden Armenia Serzh Sargsyan secara mengejutkan menyatakan bahwa “I confirmed Armenia’s decision to join the Customs Union and participate in the processes of formation of the Eurasian Economic Union.”¹² Pernyataan Presiden Armenia terkait kesediaannya untuk bergabung dalam ECU ini berlanjut pada pembentukan Eurasian Economic Union (EEU) yang rencananya akan dijalankan pada tahun 2015. Tak hanya presiden Armenia yang melakukan klarifikasi terkait hal yang sama, Perdana Menteri Tigran Sargsyan juga memberikan pernyataan bahwa, “No one has invited us to the Customs Union. The decision by Armenia to join the Customs Union was a fully conscious and well-considered step.”¹³ Serzh Sargsyan memberikan keterangan pada media bahwa masuknya Armenia ke ECU merupakan langkah pemerintah Armenia untuk mencapai kepentingan nasional dari Armenia, yakni untuk mencapai posisi strategis di Uni Eropa serta ECU yang dipimpin oleh Rusia, karena keduanya merupakan hal penting dalam kepentingan nasional Armenia.¹⁴ Kemudian pada 23 Januari 2014, Perdana Menteri Tigran Sargsyan menyatakan bahwa pemerintah Armenia setuju untuk mengaplikasikan *roadmap* keanggotaan ECU.

Bergabungnya Armenia ke ECU tersebut membuat Armenia tak lagi dapat melakukan kerjasama dengan Uni Eropa lewat DCFTA. Hal ini karena Uni Eropa menganggap bahwa anggota dari Customs Union (Eurasian Customs

¹² Marianna Grigoryan, “Armenia: Customs Union Commitment Risks EU Cooperation Chances,” *Eurasianet*, 10 September 2013, <http://www.eurasianet.org/node/67482> (diakses pada 25 September 2013)

¹³ “PM Sargsyan Calls Armenia’s Entry into Customs Union a Well-Considered Step” *Armenianow*, 1 Oktober 2013, http://armenianow.com/news/48868/armenia_prime_minister_tigran_sargsyan_st_petersburg_customs_union (diakses pada 5 Oktober 2013)

¹⁴ Narek Galstyan, “The Main Dimensions of Armenia’s Foreign and Security Policy,” *Norwegian Peacebuilding Resource Centre*, 11 April 2013, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=162794> (didapat pada tanggal 26 Maret 2014) hal. 3

Union) tak memiliki kecocokan dengan DCFTA.¹⁵ Selain itu, salah satu anggota parlemen kementerian luar negeri Armenia juga menyatakan bahwa

“The document contained a number of clauses protecting Armenia's interests, However, there were also some paragraphs which technically contradicted to the principles of the Customs Union, and now the European side is unwilling to initial the document in the agreed form.”¹⁶

Maja Kocijancic yang merupakan *spokesperson* dari unit kebijakan luar negeri Uni Eropa juga menegaskan jika Armenia telah bergabung dengan ECU, maka Armenia tidak dapat melanjutkan kerjasama yang berkaitan dengan DCFTA bersama pihak Uni Eropa. Ini karena dalam keanggotaan ECU, Armenia juga akan menerapkan sistem *common external trade policy* atau kebijakan ECU yang membuat negara-negara ECU akan memiliki kebijakan yang sama dalam melakukan perdagangan dengan negara-negara lain di luar ECU, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa.¹⁷ Bukan hanya itu, “With this step Armenia not only stopped the process of European integration and chose a different orientation in the international arena but it lost its chance to become a country with rule of law, the name and the trust which the international actors (mainly the EU) had built towards Armenia.”¹⁸ dengan langkah ini, Armenia telah melakukan perubahan pada orientasinya dan melewatkan peluang untuk masuk ke dalam Uni Eropa.

¹⁵ “Armenia Signs MoU for Russian Customs Union”, *Asbarez*, 11 April 2013, <http://asbarez.com/109346/armenia-signs-mou-for-russian-customs-union/> (diakses pada 25 September 2013)

¹⁶ Rikard Jozwiak, “Explainer: Can Armenia Square Its EU Goals With Joining Russia’s Customs Union?,” *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 5 September 2013, <http://www.rferl.org/content/armenia-eu-russia-explainer/25096959.html> (diakses pada 5 Oktober 2013)

¹⁷ Maja Kocijancic. 22 Desember 2012. dalam “Armenia: Customs Union or DCFTA,” *Lragir*, 2012, dalam <http://www.lragir.am/index/eng/0/politics/view/28488> (diakses pada 3 Juni 2014)

¹⁸ Hasmik Grigoryan, “Armenia Between the European Union and Russia,” *Ruskiivopros Issue 1*, 2014, dalam <http://www.ruskiivopros.com/?pag=one&id=563&kat=6&csl=65> (diakses pada 22 Juni 2014)

ECU merupakan badan regional yang merupakan suksesor dari Commonwealth of Independent States Customs Union (CISCU). CISCU resmi didirikan pada tahun 1996 dengan beranggotakan Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan.¹⁹ CISCU diproyeksikan sebagai suksesor dari Uni Soviet, namun CISCU mengalami kegagalan karena kurangnya *power* dari organisasi tersebut untuk mengikat negara anggotanya sehingga prioritas kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya makin tidak searah.²⁰ Pada tahun 2000, berdiri Eurasian Economic Community (EurAsEC) untuk menggantikan CISCU tersebut, dengan tujuan utama membuat sebuah *common economic space*. Pada tahun 2002, Armenia turut menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Collective Security Treaty Organization (CSTO) bersama dengan Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan.

CSTO merupakan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk membentuk aliansi militer antar anggotanya. Keanggotaan Armenia dalam CSTO tidak menentukan keanggotaan Armenia di EurAsEC. Pada tahun 2007, terjadi penandatanganan perjanjian ECU oleh Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal berdirinya ECU, yang akhirnya resmi didirikan pada tahun 2011.²¹ “The ECU is clearly seen by Russia as a vehicle for reintegrating the post-Soviet space, including the countries that fall within the

¹⁹ Ariel Cohen, “Russia’s Eurasian Union Could Endanger the Neighbourhood and U.S. Interests,” *The Heritage Foundation*, 14 Juni 2013, <http://www.heritage.org/research/reports/2013/06/russias-eurasian-union-could-endanger-the-neighborhood-and-us-interests> (diakses pada 25 September 2013)

²⁰ Wojciech Kononczuk, “The Failure of Integration. The CIS and other International Organisations in the Post Soviet Era, 1991-2006,” *Osrodek Studiow Wschodnich Studies*, 15 Mei 2007, dalam http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_26_1.pdf (diakses pada 20 September 2014) hal. 45

²¹ Ariel Cohen, “Russia’s Eurasian Union.”

sphere of the EU's eastern neighbourhood.”²² Dengan ECU, Rusia berupaya membangun kembali kejayaan Uni-Soviet yang sebelumnya kolaps dikarenakan perpecahan. ECU memiliki proyek besar yakni Eurasian Economic Union (EEU), yang akan didirikan pada 2015 mendatang dan berencana untuk membentuk sebuah *common market* layaknya EU.²³ ECU juga dianggap kurang mempromosikan demokrasi.²⁴ Rusia merupakan negara otoriter, Belarusia juga bukan negara yang menjunjung demokrasi, namun lebih kepada totaliter, dan Kazakhstan juga dalam pemerintahannya pun sama dengan kedua negara anggota-anggota ECU lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat ECU justru akan membawa Armenia kepada sebuah rezim yang otoriter dan tidak transparan.²⁵ Pada masa pembentukannya, ECU juga dianggap belum dengan jelas dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Armenia atau tidak.²⁶ Namun meskipun selain sisi yang dapat merugikan demokrasi, Rusia sebagai inisiator ECU adalah *trading partner* yang cukup berperan besar bagi perekonomian Armenia dengan presentase hingga 23% di bulan Januari-Oktober 2013.²⁷

Di satu sisi, negara-negara Uni Eropa merupakan *trading partner* terbesar bagi Armenia dengan presentase hingga lebih dari 30% dari akumulasi

²² Rilka Dragneva-Lewers & Kataryna Wolczuk, “Russia, The Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?,” *Chatham House*, Agustus 2012, dalam http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0812bp_dragnevawolczuk.pdf (didapat pada 4 Mei 2014) hal. 3

²³ Ariel Cohen, “Russia’s Eurasian Union”

²⁴ “Putin’s Power Play Jeopardizes Eurasian Union Plans,” *Deutsche Welle*, 15 Maret 2014, <http://www.dw.de/putins-power-play-jeopardizes- Eurasian-union-plans/a-17493164> (diakses pada 4 Mei 2014)

²⁵ Hasmik Grigoryan, “Armenia Between the European.”

²⁶ Marine Manucharyan, “Armenia Caught Between Russia and Europe,” *Turkish Policy Quarterly* vol. 12 no. 4, 2014, dalam http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/vol_12-no_4-manucharyan.pdf (diakses pada 2 Juni 2014) hal. 111

²⁷ Emil Danielyan, “Armenian U-Turn On EU Not as ‘Objective’ Thought,” *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 30 Desember 2013, <http://www.rferl.org/content/caucasus-report-armenia-customs-union/25216605.html> (diakses pada 4 Mei 2014)

total perdagangan. Dengan predikat tersebut, Uni Eropa dengan proyek DCFTA dianggap akan memberikan keuntungan dari sisi perekonomian daripada ECU. Selain itu, sistem pemerintahan Armenia mengadopsi sistem demokrasi, makin memberikan keuntungan bagi Armenia seandainya bergabung dengan DCFTA. Namun, yang menjadi anomali adalah Armenia justru bergabung dengan ECU bersama dengan Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan atau telah mengubah kebijakannya terkait keanggotaan ECU yang sebelumnya menyatakan tidak bersedia untuk menjadi anggota ECU. Kebijakan Armenia untuk memilih bergabung dengan ECU juga membuat Armenia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kerjasama terkait dengan DCFTA bersama dengan pihak Uni Eropa karena adanya ketidakcocokan antara negara-negara ECU dengan sistem yang akan digunakan dalam DCFTA.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini dan dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di depan, pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah mengapa pemerintah Armenia melakukan perubahan kebijakan luar negerinya terkait keanggotaan Eurasian Customs Union (ECU) dari yang sebelumnya tak berkeinginan untuk bergabung menjadi turut bergabung?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sebuah proses perubahan kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Menjelaskan sumber-sumber perubahan kebijakan luar negeri yang mengalami perubahan sehingga dapat berpengaruh terhadap sebuah proses perubahan kebijakan luar negeri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberikan tekanan kepada Armenia hingga akhirnya Armenia melakukan perubahan kebijakan luar negerinya terkait keanggotaan Eurasian Customs Union ECU.
3. Memperlihatkan tanggapan dan pandangan dari pemimpin Armenia terhadap perubahan yang terjadi tersebut hingga kemudian terjadi sebuah perubahan kebijakan luar negeri untuk turut bergabung dengan ECU tersebut.
4. Menjelaskan jenis perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Armenia.

I.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Terdapat beberapa model dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri. Ada teoritis yang menggunakan analisis tiga tahap atau yang kerap disebut sebagai *checklist model* tersebut, salah satunya adalah Jakob Gustavsson yang hanya menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh faktor internasional maupun faktor domestik yang diklasifikasikan kedalam segi ekonomi dan politik dari keduanya. Namun, penulis menganggap pembagian faktor tersebut terlalu luas dan kurang spesifik. Model milik Gustavsson tersebut tidak dapat menunjukkan pengaruh regional secara khusus karena lebih

menitikberatkan pada level internasional.²⁸ Adapun model lain yaitu *structural constraint model* yang hanya akan memfokuskan penelitian pada ada atau tidaknya tekanan dari faktor-faktor perubahan atau sumber-sumber perubahan.²⁹ Salah satu teoritis yang termasuk menggunakan model ini adalah Kjell Goldmann. Yang berikutnya adalah *cyclical model* yang menjelaskan perubahan dalam kurun waktu yang lama. Salah satu teoritis yang menggunakan model ini adalah Jerel A. Rosati yang menggunakannya dalam meneliti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga 1980 yang dikritik karena tak menjelaskan secara rinci mengenai proses masuknya faktor perubahan.³⁰

Untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Armenia, penulis menggunakan model perubahan kebijakan luar negeri dari Joakim Eidenfalk yang difokuskan pada tingkat *international source of change*. Perubahan kebijakan luar negeri merupakan suatu produk dari interaksi yang terjadi antara aktor-aktor serta faktor-faktor yang terlibat di dalam proses pembuatannya. Perubahan kebijakan luar negeri tak hanya hadir karena semata adanya tekanan yang dilakukan dari faktor-faktor, melainkan perubahan dapat juga terjadi dengan dimulai dari pihak pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan yang memang memiliki agenda atau kepentingan untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri tersebut.

“Scenario 1 begins with a change in structural conditions, which leads to influence or pressure coming from the

²⁸ Joakim Eidenfalk, “A Window of Opportunity? Australian Foreign Policy Change Towards East Timor 1998-99 and Solomon Islands 2003,” (Doctor of Philosophy thesis, School of History and Politics, Faculty of Arts, University of Wollongong, 2009), <http://ro.uow.edu.au/theses/3444> (diakses pada 27 Oktober 2013) hal. 30

²⁹ Eidenfalk, “A Window of Opportunity?” hal. 29

³⁰ Jakob Gustavsson, “How Should We Study Foreign Policy Change?”, *Journal of Cooperation and Conflict* ;34, 73, 1999, <http://cac.sagepub.com/cgi/content/refs/34/1/73> (diakses pada 15 Maret 2014), hal. 82

sources of change. This, in turn, is perceived by a key decision-maker which starts the decision-making process, which can ultimately lead to a foreign policy change. Scenario 2 differs in that it begins with a key decision-maker having an own agenda, patiently waiting for the right opportunity which can present itself through changes in structural conditions.”³¹

Dalam skenario yang kedua, proses perubahan kebijakan luar negeri berasal dari pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan yang kemudian akan mencari tekanan dan digunakan sebagai dukungan yang akan dianggapnya sebagai sumber dari perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi. Oleh karena kondisi itulah kemudian aktor kunci pembuat keputusan yang memiliki agenda tersebut dinamakan dengan *policy entrepreneur*.³² Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan skenario pertama dimana adanya sebuah perubahan yang terjadi dalam sumber-sumber perubahan kemudian dirasakan oleh aktor kunci pembuat keputusan lalu memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Pemilihan skenario pertama tersebut dikarenakan dalam kasus perubahan kebijakan luar negeri Armenia dalam ECU terjadi karena adanya pemicu perubahan yang memberikan dorongan untuk Armenia untuk melihat adanya hal yang lebih menguntungkan dan dapat diperoleh lewat ECU daripada DCFTA.

Sesuai dengan yang dijelaskan, terdapat dua jenis faktor yang dapat memengaruhi pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan dalam melakukan perubahan pada kebijakan luar negerinya yaitu, faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik terdiri dari birokrasi, opini publik, media,

³¹ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, hal 50

³² John W. Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, (New York: HarperCollins College Publishers, 1995) hal 165-195, dalam Eidenfalk, “A Window of Opportunity,” hal. 48

kelompok kepentingan, dan partai-partai politik.³³ Adapun faktor internasional yang terdiri dari faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor-aktor non-negara. Faktor internasional merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembentukan sebuah kebijakan luar negeri. Ini karena kaum realis menjelaskan bahwa politik internasional merupakan tempat atau wadah bagi negara-negara di dunia untuk berjuang dengan tujuan mendapatkan kekuatan (*power*).³⁴ Selain itu, hadirnya ketergantungan antar aktor di era kontemporer yang membuat sebuah kompleksitas politik di dunia internasional memberikan kekuatan bagi faktor internasional untuk memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Baik faktor-faktor yang terdapat pada tingkat internasional maupun domestik dapat memengaruhi satu dengan lainnya meskipun pada tingkat yang berbeda. Misalnya faktor hubungan bilateral dapat memengaruhi faktor regional dari suatu negara ketika *partner* bilateralnya memiliki kekuatan yang besar di tingkat regional dan dapat memengaruhi kondisi dari regional sebuah negara tersebut.

Dalam faktor internasional, yang pertama adalah faktor global. Faktor global dapat berupa institusi internasional dan norma internasional.³⁵ Adanya tindakan atau adanya perubahan yang terjadi pada hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri dari suatu negara layaknya peristiwa 11 September 2001 beserta tindakan Amerika Serikat dalam menanggapi hal tersebut. Faktor internasional yang kedua adalah faktor regional.

³³ Joakim Eidenfalk, "Towards a New Model of Foreign Policy Exchange", (naskah diperuntukkan kepada the Australian Political Studies Association Conference University of Newcastle, 25-27 September 2006), hal. 3

³⁴ Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *Power and Interdependence* ed. 3, (Boston: Longman, 2001) hal 1, dalam Eidenfalk, "A Window of Opportunity," hal. 43

³⁵ Eidenfalk, "A Window of Opportunity," hal 44

Sama halnya dengan faktor global, yang dapat berpengaruh dari faktor regional adalah terjadinya peristiwa atau adanya tindakan dari aktor-aktor yang berpengaruh di regional suatu negara. Jadi dengan ini dapat dinyatakan bahwa kondisi regional ataupun dinamika kebijakan luar negeri suatu negara dapat memberikan tekanan dengan adanya perubahan dari kebijakan luar negeri negara lain dalam suatu regional, hadirnya peristiwa-peristiwa seperti Bom Bali yang berdampak pada negara-negara Asia Tenggara dan Australia. Berikutnya adalah hubungan bilateral dapat memengaruhi sebuah kebijakan luar negeri dari suatu negara. Selain itu, “the power and capabilities of regional actors will affect regional politics.”³⁶ Hal ini berarti bahwa sistem regional juga dapat dihasilkan oleh aktor-aktor yang berada dalam regional tersebut. Dan perubahan pada sistem regional juga dapat memberikan pengaruh bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Pengaruh dari hubungan bilateral dapat terjadi ketika suatu negara telah melakukan atau memiliki hubungan dengan aktor lainnya baik negara maupun aktor non-negara, dan pengaruh yang diberikan dapat dengan pembentukan aliansi, perdagangan, dan atau ancaman militer dan ekonomi. Faktor internasional yang terakhir adalah aktor non-negara. Mulai meningkatnya kehadiran dan intensitas aktivitas dari aktor non-negara menjadi pertimbangan pentingnya, yaitu pertimbangan mengenai pengaruh yang dapat diberikan oleh aktor non-negara.

“Transnational actors, such as criminal networks, terrorist networks, corporations, human rights organisations etc, all play a role which can shape and influence a state’s foreign policy.”³⁷

Namun, dalam penelitian ini penulis memberikan perhatian pada faktor regional serta faktor aktor non-negara yang berperan dalam memberikan pengaruhnya

³⁶ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, hal 44

³⁷ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, hal 45

hingga terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Armenia dalam hal keanggotaan ECU.

Tekanan atau perubahan dari faktor-faktor perubah tersebut tak dapat dengan sendirinya memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan yang ada dalam negara tersebut harus melihat dan merasakan adanya jendela kesempatan (*window of opportunity*) yang hadir dan dimanfaatkan sebagai momentum agar perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi. Jendela kesempatan ini dapat muncul melalui inisiatif dari sang aktor kunci pembuat keputusan, atau justru dapat datang dari pihak eksternal lewat perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor perubah yang kemudian dirasakan keberadaannya oleh aktor kunci pembuat keputusan sehingga dapat memulai proses pembuatan kebijakan yang baru, misalnya seperti ketika ada pergantian kursi kepresidenan dari Soeharto ke Habibie di Indonesia pada tahun 1999, hal itu menjadi jendela kesempatan bagi Australia untuk melakukan perubahan kebijakannya. Selain itu, “Their perception will determine whether they see a change as beneficial enough to carry out or whether they believe the cost is too high.”³⁸ Jadi, persepsi aktor kunci pembuat keputusan terhadap keuntungan dan kerugian yang didapat dari kebijakan luar negeri yang sebelumnya dan kebijakan yang akan diambil juga memengaruhi keputusan aktor kunci tersebut apakah mau melakukan perubahan kebijakan ataukah justru memertahankan kebijakan yang sebelumnya.

Proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat menitik beratkan pada persepsi aktor kunci pembuat keputusan dalam memandang tekanan yang ada

³⁸ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, hal 16

dalam sumber perubahan. Dan terhadap sebuah jendela kesempatan yang mana akan menentukan terjadi atau tidaknya sebuah perubahan kebijakan. Persepsi atau pandangan dari aktor kunci pembuat keputusan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik yang ada pada dirinya sendiri. Hal tersebut akan mengarah pada bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin negara tersebut dalam menanggapi hadirnya gangguan atau tekanan dari sumber-sumber perubahan. Apakah dirinya menerima pengaruh yang dihasilkan oleh sumber perubahan tersebut dengan memberikan respek atau memasukkannya ke dalam proses perubahan kebijakan luar negeri atau justru tidak memilih untuk memasukkannya. Terdapat enam karakteristik yang menunjukkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin negara, yaitu (1) keyakinan dari *key decision-makers*. Keyakinan yang dimaksud adalah mengacu pada pandangan dasar seorang pemimpin terhadap dunia dan cara kerjanya. Ini akan memberikan kontribusi besar pada pandangannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dan melihat strategi apa yang dapat digunakan dalam mencapai tujuannya; (2) motif adalah hal yang mengacu pada alasan yang mendasari tindakan yang diambil oleh pemimpin. Alasan ini umumnya adalah adanya keperluan terkait kekuasaan, afiliasi, ataupun persetujuan yang diperuntukkan padanya; (3), gaya keputusan dari *key decision-makers* gaya seorang pemimpin dalam menemukan keputusan, yang memiliki beberapa kemungkinan komponen seperti keterbukaan terhadap informasi, pemilihan terhadap resiko, kompleksitas dalam penyusunan dan penataan informasi³⁹; (4) gaya interpersonal yang merupakan bagaimana

³⁹ Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders," *International Studies Quarterly*, Vol. 24, No.1, Maret 1980, hal. 10 dalam Eidenfalk, "A Window of Opportunity," hal. 47

seorang *key decision-makers* dalam berinteraksi dengan sesama pembuat kebijakan, pada umumnya Hermann menjelaskan terdapat dua gaya interpersonal dari *key decision-makers* yakni paranoia yaitu kecurigaan, dan Machiavellianisme yang merupakan perilaku manipulatif; (5) pengalaman dalam hubungan luar negeri yang akan menentukan aktif atau tidaknya *key decision-makers* dalam proses penentuan kebijakan luar negeri; dan (6) ketertarikan dalam hubungan luar negeri yang akan menentukan sikap *key decision-makers* untuk mengontrol ataukah memberikan wewenang pada aktor lain dalam sebuah proses pembuatan kebijakan luar negeri.⁴⁰

I.5 HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teori yg telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dijawab sebagai berikut. Perubahan kebijakan luar negeri Armenia terjadi karena sebelumnya Armenia memang memiliki kepentingan di dalam Eurasia Customs Union meskipun secara bersamaan melakukan negosiasi dalam hal kerjasama dengan pihak Uni Eropa. Terjadinya perubahan pada sistem regional yang berada di sekitar Armenia serta perubahan pada interaksi yang dilakukan oleh Armenia dengan aktor non-negara menjadi faktor yang memicu terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Armenia. Kemunculan jendela kesempatan lewat undangan pihak Rusia pada tanggal 3 September 2013 yang direspon positif dengan kedatangan aktor kunci pembuat keputusan Armenia dalam undangan tersebut berimplikasi pada terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Armenia, sehingga pemerintah Armenia

⁴⁰Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy," dalam Eidenfalk, "A Window of Opportunity," hal. 47

melakukan *redirection* pada kebijakan luar negerinya dari yang sebelumnya tidak berkeinginan untuk bergabung dengan Eurasian Customs Union (ECU) menjadi siap bergabung dengan ECU.

I.6 METODOLOGI PENELITIAN

I.6.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

I.6.1.1 Perubahan Sistem Regional dan Aktor Non-negara

Menurut Joakim Eidenfalk, sumber-sumber perubahan internasional yang ada dapat menghasilkan pengaruh pada suatu negara. Perubahan sistem regional dan aktor non-negara adalah beberapa hal yang menjadi sebuah sumber perubahan. Dalam Hubungan Internasional, sistem menurut Goodman adalah “the concept of "system" to refer to an arrangement among the actors.”⁴¹ Atau dengan kata lain sistem adalah susunan yang menghubungkan antar aktor-aktor. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa perubahan struktur sistem merupakan perubahan yang terjadi pada cara dan interaksi pada susunan sekumpulan aktor-aktor. Sedangkan *region* atau wilayah adalah dapat didefinisikan secara geografis yaitu sekumpulan kelompok, negara, atau teritori.⁴² William R. Thompson menjelaskan bahwa regional merupakan interaksi yang terjadi dalam suatu batasan atau wilayah.⁴³ Aktor non-negara merupakan aktor yang bukan merupakan institusi

⁴¹ Jay S. Goodman, “The Concept of System in International Relations Theory,” *Background*, vol 8, No. 4, Februari 1965, dalam <http://www.jstor.org/stable/3013730> (diakses pada 25 September 2014) hal. 259

⁴² Louise Fawcett, “Regionalism from An Historical Perspective,” dalam *Global Politics of Regionalism*, diedit oleh Marry Farrell, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove (London: Pluto Press, 2005) hal. 24

⁴³ William R. Thompson, “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a Propositional Inventory,” *International Studies Quarterly*, Vol 17, No. 1, Maret 1973, dalam <http://www.jstor.org/stable/3013464> (diakses pada 25 September 2014) hal. 96

pemerintahan.⁴⁴ Contoh-contoh aktor non-negara adalah “criminal networks, terrorist networks, corporations, human rights organisations etc.”⁴⁵

Faktor global menghasilkan tekanan dengan adanya perubahan pada kondisi dan sistem internasional yang ada; pada regional, dinamika yang terjadi regional akan memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. “The power and capabilities of regional actors will affect regional politics, particularly when a state is considering its foreign policy actions.”⁴⁶ Selain itu, perubahan pada tatanan regional juga membuat sebuah negara harus mempertimbangkan faktor regional. Pada hubungan bilateral, tekanan merupakan hasil dari pengaruh yang dilakukan oleh negara atau aktor lain yang menjalin hubungan dengan negara pembuat kebijakan dengan menggunakan pembentukan aliansi dan menjalin hubungan perdagangan, serta dengan memberikan ancaman militer dan ekonomi; dan aktor non-negara dapat memberikan tekanan dengan tindakan yang dilakukannya.⁴⁷ Dinamika yang dimaksud dalam faktor aktor non-negara dalam penelitian ini adalah pengumuman kenaikan harga gas dari pihak Gazprom pada pertengahan tahun 2012 dan pada pertengahan 2013, serta dinamika regional mengenai rencana pembukaan jalur Abkhazia dan dinamika konflik di Nagorno Karabakh.

1.6.1.2 Jendela Kesempatan (*Window of Opportunity*)

⁴⁴ Peter Willets, “Transnational Actors and International Organizations in Global Politics,” dalam *The Globalization of World Politics*, diedit oleh John Bayliss dan Steve Smith (New York: Oxford University Press Inc., 2001) hal. 426

⁴⁵ Eidenfalk, “A Window of Opportunity,” Hal 45

⁴⁶ Eidenfalk, “A Window of Opportunity,” hal 44

⁴⁷ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, Hal 42-45

Jendela kesempatan merupakan sebuah peluang untuk melakukan sesuatu dan hanya hadir pada saat yang pendek.⁴⁸ Adapun definisi lain yang menjelaskan jendela kesempatan sebagai “an opportunity to do something that will only last for a short time and needs to be taken advantage of quickly.”⁴⁹ Yang berarti adalah sebuah kesempatan yang harus ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sesegera mungkin sebelum kesempatan tersebut hilang karena waktu dan jangka kemunculan yang singkat. John Kingdon kemudian menganalogikan jendela kesempatan ini dengan,

“The target planets are in proper alignment, but will not stay that way for long. Thus the launch must take place when the window is open, lest the opportunity slip away. Once lost, the opportunity may recur, but in the interim, astronauts and space engineers must wait until the window reopens.”⁵⁰

Dalam analoginya tersebut, Kingdon menjelaskan bahwa jendela kesempatan merupakan sebuah peluang yang muncul pada waktu tertentu saja atau tidak dapat sewaktu-waktu hadir. Oleh karena itu, perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi ketika aktor kunci pembuat kebijakan telah mengambil peluang tersebut.

1.6.1.3 Aktor Kunci Pembuat Keputusan

Aktor kunci pembuat keputusan adalah seseorang yang membuat keputusan maupun keputusan-keputusan.⁵¹ Dalam kamus Oxford, kata *key* atau kunci dalam

⁴⁸ *MacMillan Dictionary*, kb, “Window of Opportunity,” <http://www.macmillan.com/dictionary/british/window-of-opportunity> (diakses pada 5 Mei 2014)

⁴⁹ *Collins Dictionary*, kb, “Window of Opportunity,” <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/window-of-opportunity> (diakses pada 5 Mei 2014)

⁵⁰ Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, hal. 166

⁵¹ Sushil Brion Shenoy, “A Framework for Identifying Key Decision Makers for Institutional Owner Capital Projects”, MSE Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 14 Agustus 2009, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08282009121214/unrestricted/Shenoy_SB_T_2009.pdf (diakses pada 3 April 2014) hal. 21

kata sifat merupakan sesuatu yang sangat penting dan esensial.⁵² Sedangkan John Kingdon menyatakan *key decision-makers* sebagai seorang *policy entrepreneur* yang dapat mendorong agenda yang dimilikinya lewat *Window of Opportunity*.⁵³ Eidenfalk juga memberikan penjelasan bahwsanya seorang pemimpin dalam suatu negara merupakan pihak yang dapat membuat *Window of Opportunity* dan mendorong persepsinya terhadap sumber perubahan untuk turut kemudian masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena posisinya dalam proses pembentukan kebijakan dan sumber daya yang dimiliki olehnya.⁵⁴

Pada penelitian ini, Presiden Armenia Serzh Sargsyan dan Perdana Menteri Tigran Sargsyan merupakan aktor-aktor kunci pembuat keputusan dalam kebijakan luar negeri Armenia. “But Armenia is a presidential republic. The power of the head of state surpass those of the head of government.”⁵⁵ Atau dengan kata lain, meskipun memiliki seorang perdana menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, seorang presiden yang juga menjadi kepala negara tetap memegang kendali dalam menentukan batasan umum dan parameter dasar dari kebijakan ekonomi, domestik, maupun luar negeri. Dalam konstitusi Armenia, seorang presiden merupakan seseorang yang menjamin kemerdekaan, integritas teritorial, dan keamanan dari Armenia.⁵⁶ Presiden juga merupakan pihak yang mewakili negara dalam hubungan internasional negara tersebut.

1.6.1.4 Perubahan Kebijakan Luar Negeri

⁵² *Oxford Learner's Pocket*, ks, “Key,” hal. 249

⁵³ Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, hal. 167

⁵⁴ Eidenfalk, “A Window of Opportunity”, Hal 50

⁵⁵ “Robert Khocaryan Declares War on Official Yerevan,” *Gulustan*, 14 Januari 2014, dalam <http://www.gulustan.info/2014/01/robert-kocharyan-declares-war-on-official-yerevan/> (diakses pada 12 Juni 2014)

⁵⁶ The President of the Republic of Armenia, “Chapter 5: ThePresident of The Republic”, *The Constitution of RA*, 2014, dalam <http://www.president.am/en/chapter3/> (diakses pada 3 April 2014)

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dari sebuah pemerintahan yang dilakukan untuk menjaga kepentingan sebuah negara dan juga untuk merespon hal-hal yang tidak diinginkan⁵⁷. Sedangkan Deborah Gerner berpendapat bahwasanya

“the intentions, statements, and actions of an actor—often, but not always, a state—directed toward the external world and the response of other actors to these intentions, statements and actions”⁵⁸

Selain itu, Visensio Dugis menjelaskan kebijakan luar negeri sebagai pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek negara dan berhubungan dengan aktor lain yang berada di lingkungan eksternal negara tersebut dan bertujuan untuk memenuhi atau mencapai kepentingan nasional negara tersebut di dunia internasional.⁵⁹ Dengan ini dapat dikatakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan, pernyataan, dan maksud yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pihak otoritatif dalam sebuah pemerintahan yang mengatasnamakan negara. Selain itu, kebijakan luar negeri juga merupakan respon atau tanggapan dari reaksi aktor-aktor lain dalam hubungan internasional maupun lingkungan domestik negara yang menanggapi kebijakan luar negeri negara tersebut.

Dalam mengoperasionalkan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa jenis *typology of change* atau jenis arah kebijakan luar negeri yang mengalami upaya perubahan. Jenis-jenis tersebut adalah; (1) stabilitas, yang ditandai dengan tidak adanya perubahan; (2) reduksi, yang ditandai dengan adanya perubahan

⁵⁷ James N. Rosenau, “Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy,” dalam *New Directions in the Study of Foreign Policy*, edit oleh Charles F. Hermann, et, al., (Boston: Allen & Unwin, 1987) hal. 2

⁵⁸ Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in the Globalized Era*, (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Inc, 2008) Hal. 9

⁵⁹ Vinsensio Dugis, “Explaining Foreign Policy Change”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, vol. 21 no.2, 2010, hal. 41

kuantitatif dalam kebijakan yang baru; (3) *refinement*, yang ditandai dengan adanya perubahan kualitatif namun juga masih terdapat unsur dari kebijakan sebelumnya; (4) reformasi, yang ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif dan menyeluruh dalam instrumen kebijakan luar negeri; (5) *redirection* yang ditandai dengan adanya perubahan pada beberapa tujuan namun juga masih terdapat tujuan yang sebelumnya; (6) reorientasi, yang ditandai dengan perubahan tujuan secara total; dan (7) *restructuring* yang ditandai dengan perubahan yang terjadi di semua aspek dan berdampak pada semua aktor.⁶⁰ Dalam penelitian ini, perubahan kebijakan luar negeri yang dimaksud adalah perubahan kebijakan luar negeri Armenia terkait dengan keanggotaan Eurasian Customs Union (ECU) yang sebelumnya tidak tertarik untuk bergabung kemudian menyatakan siap untuk bergabung dengan ECU yang termasuk dalam kategori *redirection* karena perubahan yang terjadi telah terjadi pada tujuannya, namun tetap mempertahankan tujuan yang lama.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian dengan jenis eksplanasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain,⁶¹ dengan kata lain penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel dalam pelaksanaannya. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel. Yang pertama variabel independen yaitu tekanan sumber-sumber perubahan kebijakan luar negeri, yang kedua adalah variabel intervensi yaitu *key decision-makers*, serta yang ketiga

⁶⁰ Eidenfalk, "A Window of Opportunity", Hal 52

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) Hal. 51

adalah variabel dependen yaitu *output* atau perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan sebuah hipotesis yang nantinya akan diujikan.⁶²

I.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penulis menggunakan jangkauan waktu dari tanggal 4 April 2012 hingga 23 Januari 2014. Pemilihan tanggal 4 April 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut pemerintah Armenia lewat Perdana Menteri Tigran Sargsyan mengumumkan bahwa Armenia tidak berkeinginan untuk bergabung ke dalam Eurasian Customs Union (ECU). Sedangkan pemilihan tanggal 23 Januari 2013 sebagai titik akhir karena, pemerintah Armenia telah menyetujui *roadmap* keanggotaan ECU yang diajukan oleh pihak Eurasian Economic Commission (EEC). Pernyataan Serzh Sargsyan dalam pertemuan dengan Putin melewati proses diskusi yang dilakukan oleh parlemen Armenia yang kemudian memberikan dukungan untuk mengajukan *roadmap* sebagai syarat keanggotaan ECU. Hal ini juga menandakan perubahan kebijakan Armenia terkait dengan keanggotaan dari ECU setelah sebelumnya memberikan penolakan untuk berpartisipasi.⁶³ Namun, penulis juga akan memperkuat data dengan melakukan pengumpulan data sebelum titik awal jangkauan penelitian yang ditentukan.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur atau kepustakaan. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder karena data yang didapat nantinya akan

⁶² Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Hal. 51

⁶³ Rilka Dagneva & Kataryna Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union", hal 2-3

merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan juga telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan⁶⁴. Selain itu data-data tersebut berupa seperti artikel-artikel jurnal ilmiah, artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah atau media lain terkenal, buletin statistik, laporan-laporan, hasil survei terdahulu, arsip pemerintah yang dipublikasi, analisis para ahli terkait data primer atau permasalahan yang diangkat, serta arsip dari organisasi yang berkaitan⁶⁵.

I.6.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dalam menganalisis data yang ada. Adapun sebab penggunaan teknik analisis ini adalah karena penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁶⁶ Dalam pengumpulan datanya, teknik ini akan menghasilkan data berupa kata-kata bukan merupakan angka-angka seperti dalam metode kuantitatif. Metode ini juga akan menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan atau problematika yang diangkat, sehingga tak hanya akan mendapatkan suatu generalisasi terkait perbandingan permasalahan-permasalahan melainkan sebuah pemahaman yang lebih jauh dalam mengenai hal tersebut. Metode kualitatif lebih menekankan pada aspek informasi yang disampaikan melalui kata-kata misalnya deskripsi, perhitungan, opini, perasaan dan lain sebagainya.⁶⁷ Selain itu dengan menggunakan data kualitatif,

⁶⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UNPAR Press, 2006, hal. 266

⁶⁵ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Hal 266

⁶⁶ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hal 70

⁶⁷ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Hal 311

penulis akan menghadirkan data-data berupa informasi yang tersusun dan dapat memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan tertentu.⁶⁸

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II: Berisikan paparan dan penjelasan mengenai faktor-faktor regional dan faktor aktor non-negara yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Armenia.
- BAB III: Berisikan penjelasan mengenai persepsi aktor kunci pembuat keputusan terhadap sumber-sumber perubahan.
- BAB IV: Analisis perubahan kebijakan luar negeri Armenia
- BAB V : Kesimpulan

⁶⁸ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Hal 312